PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

LAPORAN KEUANGAN

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI BENGKULU**

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
TAHUN ANGGARAN 2022**

**Jalan Mayor Jenderal S. Parman No.7 (0736) 21620-21623-21625 Fac (0736) 22117
Bengkulu - 38227**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala OPD sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Bengkulu yang menerima dana dari Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahunan ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja. Berdasarkan laporan ini, realisasi pendapatan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.237.946.000,00 atau 34,44% dari pagu anggaran sebesar Rp. 690.900.000,00. Sementara itu, realisasi belanja (netto) adalah sebesar Rp.914.154.511.881,00 atau 97,92 % dari yang dianggarkan dalam DPPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 933.540.304.234,00
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2022. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp. 1.199.111.521.101,82 dan Kewajiban sebesar Rp.59.382.563,00 sehingga Ekuitas (kekayaan bersih) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.1.199.052.138.538,82;
3. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Kami menyadari bahwa laporan keuangan Tahun Anggaran 2022 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Bengkulu, Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Bengkulu

Drs. Eri Yulian Hidayat

NIP. 19670725199303 1 004

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSIBENGGKULU

Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bengkulu , Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Bengkulu

Drs. Eri Yulian Hidayat
NIP. 19670725199303 1004

RINGKASAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala SKPD Provinsi yang selaku pananggungjawab dalam penyelenggaraan anggaran pada tingkat OPD menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang setiap semester dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada gubernur pemberi dana APBD, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Sesuai Pasal 265 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Gubernur selaku Kepala Pemerintah Daerah, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2022 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan asli daerah dan belanja selama periode 1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2022 merupakan Penerimaan Daerah sebesar Rp. 237.946.000,- atau 34,44% dari pendapat yang dianggarkan atau estimasi pendapatan dalam TA 2022 sebesar Rp. 690.900.000,-. Realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2022 seperti tabel berikut :

No.	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1.	Pendapatan Restribusi Daerah	690.900.000,00	237.946.000,00	34,44%

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 914.154.511.881,00 atau mencapai 97,92% dari pagu anggaran sebesar Rp. 933.540.304.234,00 dimana seluruhnya merupakan realisasi belanja Rupiah Murni. Penjelasan Realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 seperti tabel berikut.

No.	Pagu Anggaran	Realisasi Belanja	% (Prosentase)
1	2	3	4
1	933.540.304.234,00	914.154.511.881,00	97,92%

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

Jumlah Aset per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.1.199.111.521.101,82 yang terdiri dari :

- a) Aset Lancar sebesar Rp.(126.192.227.877,00)
- b) Aset Tetap sebesar Rp.1.325.275.206.314,15
- c) Aset Lainnya sebesar Rp.28.542.664,67

Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp.59.382.563,00 merupakan hutang beban pemakaian di muka di Tahun Anggaran 2022 dan Hutang Kepada Pihak Ketiga.

Sementara itu jumlah Ekuitas Dana per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.1.199.052.138.538,82.

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Daerah (KUD).

Sementara itu, dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUD.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

NERACA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BENGKULU

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022(*Unaudited*) ini kami sajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penetapan APBDP-Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022.

A.2 KEBIJAKAN TEKNIS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BENGKULU

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu disusun dengan mengacu kepada Renstra Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu selaku penanggungjawab sistem pendidikan di provinsi bertekad mewujudkan cita-cita luhur tersebut dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2020-2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Renstra Depdikbud menjadi pedoman bagi semua tingkatan pengelola pendidikan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan dan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan pendidikan nasional serta mengevaluasi hasilnya.

Hasrat mulia tersebut, direkomendasikan untuk ditempuh dalam empat tahapan, dengan periode lima tahunan. Periode 2020-2025 diarahkan dalam rangka peningkatan kapasitas dan modernitas sistem pendidikan. Periode 2020-2025 adalah peningkatan dan penguatan pelayanan pendidikan pada tingkat nasional. Periode 2020-2025 adalah penguatan daya saing pada tingkat regional. Sedangkan periode 2020-2025 adalah penguatan daya saing pada tingkat internasional.

Renstra Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2025 ini merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan hasrat mulia tersebut. Rencana program serta sumber daya yang tersedia pada periode ini difokuskan kepada:

- 1) Pemerataan dan perluasan akses pendidikan;
- 2) Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; serta
- 3) Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik seluruh jajaran pendidikan di pusat dan daerah.

Upaya mewujudkan hal tersebut di atas merupakan suatu pekerjaan yang sangat berat. Oleh karena itu, diperlukan tekad yang kuat disertai dengan tindakan yang sungguh-sungguh, mulai dari tingkat pemerintah pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten/kota, satuan pendidikan, dan unsur masyarakat lainnya.

A.3 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh PPK-OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Tahun 2022 ini memperoleh anggaran yang berasal dari APBD awal sebesar Rp.893.564.967.742,00. Pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Dinas Pendidikan mengalami perubahan sehingga menjadi sebesar Rp 933.540.304.234,00 atau mengalami penambahan sebesar 4,00% atau senilai Rp. 39.975.336.492,00 dari pagu APBD awal.

Laporan keuangan menggunakan basis akrual yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum daerah

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUD.

Penyusunan dan penyajian LK Tahun Anggaran 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan LK telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu adalah:

1. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUD. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari kas umum daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Belanja disajikan di muka (face) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja,

3. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca OPD per 31 Desember 2022 berdasarkan harga perolehan.

c. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya. Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat

jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

4. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Pemakaian beban dimuka, Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

5. Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode Tahun Anggaran 2022, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu menerima pagu DPA awal sebesar Rp. 893.564.967.742,00 Pada perubahan APBD Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertambah sebesar Rp. 39.975.336.492,00 sehingga menjadi sebesar Rp.933.540.304,234,00. Penjelasan tentang perubahan anggaran belanja seperti table berikut :

No.	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / berkurang
1	2	3	4	5
1	Belanja	893.564.967.742,00	933.540.304.234,00	39.975.336.492,00
1	Belanja Pegawai	502.887.698.040,00	534.343.503.811,00	31.455.805.771,00
	Belanja Barang dan Jasa	210.453.746.467,00	228.900.755.098,00	18.447.008.631,00
	Belanja Hibah	2.975.000.000,00	13.958.520.000,00	10.983.520.000,00
2	Belanja Modal	177.593.253.235,00	156.337.525.325,00	(21.255.727.910,00)

Dari pagu belanja sebesar Rp. 933.540.304,234,00 tersebut telah digunakan untuk membiayai seluruh operasional kegiatan dan telah terealisasi sebesar Rp.914.154.511.881,00 atau 97,92% dari pagu anggaran.

Realisasi belanja sebesar Rp. 914.154.511.881,00 tersebut merupakan realisasi brutto untuk Belanja Pegawai sebelum pengembalian kelebihan pembayaran dan realisasi netto setelah dikurangi pengembalian sisa belanja selama Tahun Anggaran 2022 untuk Belanja Barang dan Jasa.

B.2 PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.2.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu selama Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 237.946.000,00 sedangkan estimasi pendapatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu dalam Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 690.900.000,00 sehingga realisasi pendapatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bengkulu sebesar 34,44 % dari target pendapatan.

Realisasi Pendapatan sebesar Rp. 237.946.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bengkulu tersebut berasal dari penerimaan restribusi daerah yang meliputi restribusi pemakaian kekayaan, restribusi tempat penginapan/Villadan restribusi tempat rekreasi dan olah raga, dengan rincian seperti table berikut :

No.	Uraian	Pagu Pendapatan	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5
1	Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	528.900.000,00	220.484.000,00	41,71%
2	Restribusi Tempat Penginapan/ Pesangrahan/Villa	144.000.000,00	0,00	0,00%
3	Restribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	18.300.000,00	17.462.000,00	95,42%
	Jumlah	690.900.000,00	237.946.000,00	34,44%

B.2.2 Belanja

Realisasi Belanja selama Tahun 2022 sebesar Rp. 914.154.511.881,00 yang terdiri dari realisasi belanja operasional sebesar Rp. 757.841.214.682,46 dan belanja modal sebesar Rp. 156.313.297.198,54

Rincian realisasi belanja sebesar Rp. 914.154.511.881,00 tersebut seperti table berikut :

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.	Belanja Operasional	777.202.778.909,00	757.841.214.682,46	97,51%
2.	Belanja Modal	156.337.525.325,00	156.313.297.198,54	99,92%
	Jumlah	933.540.304.234,00	914.154.511.881,00	97,10%

B.2.2.1 Belanja Operasional

Realisasi Belanja Operasional selama Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 757.841.214.682,46 atau 97,51% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBDP sebesar Rp. 777.202.778.909,00. Realisasi Belanja Operasional tersebut terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja hibah dengan rincian seperti table berikut:

No.	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.	Belanja Pegawai	534.343.503.811,00	521.203.187.513,00	97,54%
2.	Belanja Barang dan Jasa	228.900.755.098,00	222.961.257.819,46	92,68%
3.	Belanja Hibah	13.958.520.000,00	13.676.769.350,00	97,46%
	Jumlah	777.202.778.909,00	757.841.214.682,46	97,51%

B.2.2.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai pada belanja operasional sebesar 521.203.187.513,00 atau 97,54 % dari jumlah yang dianggarkan dalam APBDP sebesar Rp. 534.343.503.811,00 tersebut terdiri dari gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp. 520.104.262.824,00, belanja pegawai kegiatan pada dinas sebesar Rp. 1.085.944.689,00 dan belanja pegawai kegiatan pada Cabdin dan UPTD sebesar Rp. 12.980.000,00

B.2.2.2.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Operasional sebesar Rp. 222.961.257.819,46 terdiri dari realisasi belanja barang dan jasa pada program kegiatan pada dinas sebesar Rp. 126.949.731.422,49; realisasi belanja barang dan jasa pada cabdin dan UPTD sebesar Rp. 3.935.050.647,97 dan realisasi belanja barang dan jasa dari dana BOS 2022 sebesar Rp. 92.076.475.749,00.

B.2.2.2.3 Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah pada Belanja Operasional sebesar Rp. 13.676.769.350,00 terdiri dari realisasi belanja hibah pada program kegiatan pada dinas sebesar Rp. 2.850.000.000,00 dan realisasi belanja hibah dari dana BOS 2022 sebesar Rp. 10.826.769.350,00.

B.2.2.2 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal selama Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 156.313.297.198,54 atau 99,98 % dari jumlah yang dianggarkan dalam DPPA sebesar Rp 156.337.525.325,00. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan rincian seperti pada table berikut :

No.	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Belanja Tanah	250.000.000,00	0,00	0,00%
2	Belanja Gedung dan Bangunan	44.191.209.200,00	44.024.078.050,73	99,62%
3	Belanja Peralatan dan Mesin	99.689.439.235,00	92.424.554.255,81	92,71%
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00%
5	Belanja Aset tetap Lainnya	12.206.676.890,00	19.864.664.892,00	162,74%
	Jumlah	156.337.525.325,00	156.313.297.198,54	96,81%

B.2.3 Pengembalian Belanja

Jumlah dana melalui SP2D UP/GU/TU/LS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bengkulu pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 776.322.560.333,00 yang terdiri dari dana untuk dinas sebesar Rp. 772.344.994.272,03 dan dana untuk cabang dinas dan UPTD sebesar Rp. 3.977.566.060,97. Dari realisasi penerimaan dana sebesar Rp. 776.322.560.333,00 tersebut direalisasikan belanja sebesar Rp. 776.280.044.920,00 dengan rincian belanja dinas sebesar Rp. 772.344.994.272,03 dan belanja cabdin dan UPTD sebesar Rp. 3.935.050.647,97; dengan demikian terdapat sisa dana belanja sebesar Rp. 42.515.413,00 yang harus disetor ke kas daerah. Rincian penerimaan dan pengeluaran SP2D seperti tabel berikut :

No.	Uraian	Penerimaan Dana	Pengeluaran Dana	Sisa Dana
1	2	3	4	5
1.	SP2D UP	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00
2..	SP2D GU	9.461.949.118,00	9.461.949.118,00	0,00
2.	SP2D TU	4.009.331.005,00	3.966.815.592,00	42.515.413,00
3.	SP2D LS Gaji	523.137.012.513,00	523.137.012.513,00	0,00
4.	SP2D LS Barang dan Jasa	238.964.267.697,00	238.964.267.697,00	0,00
	Jumlah	776.322.560.333,00	776.280.044.920,00	42.515.413,00

B.2.3.3 Setoran Pengembalian Sisa Dana Belanja

Seluruh sisa dana belanja sebesar Rp. 42.515.413,00 tersebut semuanya telah disetor ka kas daerah. Rincian setoran sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Penerimaan SP2D	Jumlah sisa dana	Jumlah Setoran	STS
1	2	3	4	5
	SP2D UP	0,00	0,00	Terlampir
	SP2D TU Cabang Dinas	42.515.413,00	42.515.413,00	
	SP2D TU Dinas	0,00	0,00	
	Jumlah	42.515.413,00	42.515.413,00	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. PENJELASAN UMUM NERACA

Neraca Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu per 31Desember 2022 menunjukkan posisi sebagai berikut:

Jumlah Aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp.1.199.111.521.101,82 denganrincian seperti table berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1	2	3
1.	Aset Lancar	(126.192.227.877,00)
2.	Aset Tetap	1.325.275.206.314,15
3.	Aset Tetap Lainnya	28.542.664,67
	Jumlah Aset	1.199.111.521.101,82

Jumlah Kewajiban per 31Desember 2022 sebesar Rp. 59.382.563,00 yang harus dibayar pada Tahun Anggaran 2022.

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.199.052.138.538,82

C.2 PENJELASAN PER POS NERACA

C.2.1 Aset Lancar

C.2.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp 454.267,00 merupakan pendapatan lainnya dari dana BOS SMAN, SMKN DAN SLBN tahun 2022 yang belum disetor ke kas daerah.

C.2.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp 0,00 dikarenakan seluruh penerimaan pendapatan telah disetor ke kas Daerah.

C.2.1.3 Kas Lainnya

Kas Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 282.677.603,00 merupakan saldo kas pada bendahara BOS SMAN, SMKN dan SLBN se Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022.

C.2.1.4 Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp 975.000,00 dengan perincian seperti table berikut :

No.	Nama Persediaan	Nilai
1	2	3
1.	Barang Pakai Habis	975.000,00
	Jumlah	975.000,00

C.2.2. Aset Tetap

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.199.111.521.101,82 yang merupakan akumulasi dari saldo aset tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.044.887.535.081,68 ditambah jumlah aset hasil perolehan tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 156.313.297.198,54 Penjelasan Aset Tetap lebih lanjut seperti tabel berikut :

No.	Nama Aset Tetap	Saldo Tahun 2021	Perolehan Tahun 2022	Jumlah s.d. Tahun 2022
1	2	3	4	5
1.	Tanah	268.454.531.903,30	0,00	268.454.531.903,30
2.	Peralatan dan Mesin	520.279.158.052,53	92.424.554.255,81	612.703.712.308,34
	Gedung dan Bangunan	599.216.617.353,66	44.024.078.050,73	643.240.695.404,39
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.002.780.599,43	0,00	4.002.780.599,435
4.	Aset Tetap Lainnya	145.578.887.818,79	19.864.664.892,00	165.443.552.710,79
5.	Akumulasi Penyusutan Aset	(191.738.799.999,76)		(191.738.799.999,76)
6.				
	Jumlah	1.044.887.535.081,68	156.313.297.198,54	1.199.044.887.081,68

C.2.2.1. Aset Tetap Tanah

Jumlah nilai aset tetap tanah sebesar Rp. 268,454,531.903,30 merupakan saldo aset tetap tanah tahun 2021 sebesar Rp. 268,454,531.903,30. Tahun Anggaran 2022 tidak ada perolehan aset tetap tanah.

C.2.2.2. Peralatan dan Mesin

Jumlah aset tetap Peralatan dan Mesin pada neraca per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 612.703.712.308,34 berasal dari perolehan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 92.424.078.050,73 ditambah saldo aset tetap peralatan dan mesin Tahun 2021 sebesar Rp. 520.279.158.052,53. Rincian perolehan aset tetap peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 seperti tabel berikut :

No.	Nama Kegiatan	Jumlah
1	2	3
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas dan	544.300.000,00
2.	Jabatan	38.968.300,00
3.	Pengadaan Peralatan dan Mesin	3.295.772.000,00
4.	Lainnya	63.103.494.325,00
5.	Pengadaan Alat Praktek dan	1.156.622.960,00
6.	Peraga Siswa SMA	15.903.576.970,00
7.	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa SMK Pengadaan Meubeler SMK Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa SLB Pengelolaan Dana BOS SMAN, SMKN dan SLBN	
Jumlah		92.424.554.255,81

C.2.2.3. Gedung dan Bangunan.

Jumlah nilai aset tetap gedung dan bangunan pada neraca per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 643.240.695.404.39 merupakan hasil perolehan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 44.024.078.050,73 ditambah saldo aset tetap gedung dan bangunan tahun 2021 sebesar Rp. 599.216.617.353,66. Rincian perolehan aset tetap gedung dan bangunan Tahun Anggaran 2022 seperti table berikut :

No	Nama Kegiatan	Jumlah
1	2	3
1.	Penambahan Ruang Kelas Baru SMA	3.535.788.000,00
2.	Pembangunan Ruang Guru/Kasek/TU SMA	4.161.693.000,00
3.	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi SMA	2.833.850.000,00
4.	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika SMA	2.440.326.000,00
5.	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia SMA	2.813.174.000,00
6.	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SMA	3.575.447.000,00
7.	Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah SMA	5.274.537.000,00
8.	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SMA	1.898.226.383,41
9.	Penambahan Ruang Kelas Baru SMK	1.924.537.652,64
10.	Pembangunan Ruang Praktek Siswa SMK	5.617.173.226,05
11.	Pembangunan Ruang Laboratorium SMK	2.109.868.200,00
12.	Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah SMK	1.582.329.600,00
13.	Pembangunan Ruang Perpustakaan SMK	698.909.400,00
14.	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SMK	1.892.858.588,63
15.	Penambahan Ruang Kelas Baru PLK	2.204.420.000,00
16.	Pembangunan Ruang Guru/Kasek/TU PLK	869.240.000,00
17.	Pembangunan Ruang Kesehatan Sekolah PLK	350.150.000,00
18.	Pembangunan Kantin Sekolah P	291.550.000,00
	Jumlah	44.024.664.050,73

C.2.2.5 Aset Tetap Lainnya.

Nilai aset tetap lainnya pada neraca per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 165.443.552.710,79 merupakan perolehan Aset Tetap Lainnya pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.19.964.664.892,00 ditambah saldo aset tetap lainnya tahun 2021 sebesar Rp. 145.578.887.818,79. Perolehan aset tetap lainnya Tahun Anggaran 2022 berasal dari kegiatan Pengelolaan Dana BOS SMAN, SMKN dan SLBN Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022.

C.2.3. Kewajiban

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 59.382.563,00 berupa hutang beban pemakaian dimuka dan hutang kepada pihak ketiga. Rincian Jumlah Kewajiban Jangka Pendek atau hutang seperti table berikut :

No	Nama Hutang	Jumlah
1	2	3
1.	Hutang Beban Pemakaian Listrik dan Telpon	24.010.659,00
2.	Hutang Beban Pemakaian Internetaet	6.511.904,00
3.	Hutang Kepada Pihak Ketiga	28.860.000,00
	Jumlah	59.382.547,00

D. Pengelolaan Dana Bos

D.1. Anggaran Dana BOS

Pada Tahun Anggaran 2022 dalam dokumen DPPA tersedia pagu anggaran dana BOS sebesar Rp. 141.840.189.054,00 yang diperuntukan kepada Satuan Pendidikan Menengah Atas, Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan dan Satuan Pendidikan Khusus. Rincian Pagu Anggaran berdasarkan satuan pendidikan dijelaskan seperti table berikut :

No	Nama Satuan Pendidikan	Jumlah Anggaran
1	2	3
1.	Satuan Pendidikan Menengah Atas	83.659.869.883,00
2.	Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	52.956.679.171,00
3.	Satuan Pendidikan Khusus	5.223.640.500,00
	Jumlah	141.840.189.054,00

D.2. Realisasi Salur Dana BOS

Berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T) Propinsi Bengkulu dan data notifikasi dari KPPKN jumlah realisasi salur dana BOS Tahun 2022 sebesar Rp. 137.585.781.700,00 yang terdiri dari Dana BOS Hibah sebesar Rp. 10.826.769,350,00 dan Dana BOS untuk SMAN, SMKN dan SLBN sebesar Rp. 126.759.012.350,00. Rincian salur dana BOS dapat dijelaskan seperti table berikut :

No	Klasifikasi Dana BOS	Nama Satuan Pendidikan	Jumlah Salur
1	2	3	4
I.	BOS Hibah		10.826.769.350,00
1.		SMASWASTA	3.442.520.806,00
2.		SMK SWASTA	6.609.848.544,00
3.		SLB SWASTA	774.400.000,00
II.	BOS Negeri		126.759.012.350,00
1.		Satuan Pendidikan Menengah Atas	75.894.665.961,00
2.		Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	45.235.025.174,00
3.		Satuan Pendidikan Khusus	4.426.821.215,00
		Jumlah	137.585.781.700,00

D.3. Penerimaan Pendapatan BOS Reguler dan Kinerja Negeri

Pada Tahun Anggaran 2022 untuk Satuan Pendidikan SMAN, SMKN dan SLBN menerima salur dana BOS sebesar Rp. 126.759.012.350,00 ditambah saldo awal tahun 2022 sebesar Rp. 679.809.054,00; ditambah penerimaan pendapatan lainnya sebesar Rp. 48.081.989,00 sehingga total dana BOS pada SMAN, SMKN dan SLBN selama tahun 2022 sebesar Rp. 127.486.903.393,00. Penjabaran penerimaan pendapatan dana BOS tahun 2021 diuraikan seperti table berikut :

No	Pendapatan	Satpend. SMAN	Satpend. SMKN	Satpend. SLBN	Jumlah
1	2			3	4
1.	Saldo Awal	180.371.938,00	486.819.171,00	12.617.945,00	679.809.054,00
2.	Dana BOS	76.964.665.961,00	45.235.025.174,00	4.559.321.215,00	126.759.012.350,00
3.	Pendapatan Lain-lain	36.790.704,00	11.137.187,00	154.098,00	48.081.989,00
	Jumlah	77.181.828.603,00	45.732.981.846,00	4.572.093.2586,00	127.486.903.393,00

D.4. Pengeluaran Dana BOS Reguler dan Kinerja Negeri

Jumlah dana BOS untuk Satuan Pendidikan SMAN, SMKN dan SLBN sebesar Rp. 127.486.903.393,00 telah dikeluarkan untuk belanja BOS sebesar Rp. 127.034.717.611,00; biaya administrasi bank, penutupan rekening dan pengembalian uang deposit sebesar Rp. 37.416.833,00 dan setoran bunga bank dan dana lainnya sebesar Rp. 132.091.346,00 sehingga total pengeluaran dana BOS pada SMAN, SMKN dan SLBN selama tahun 2022 sebesar Rp. 127.204.225.790,00. Penjabaran pengeluaran dana BOS tahun 2022 diuraikan seperti tabel berikut :

No	Pengeluaran	Satpend. SMAN	Satpend. SMKN	Satpend. SLBN	Jumlah
1	2			3	4
1.	Belanja Br Jasa	54.280.969.937,00	34.352.607.798,00	3.442.898.014,00	92.076.475.749,00
2.	Belanja Modal	22.534.187.110,00	11.301.717.150,00	1.122.337.602,00	34.958.241.862,00
3.	Adm Bank dll	36.225.699,00	958.145,00	128.600,00	37.416.833,00
4.	Setoran lain2	97.416.192,00	32.018.885,00	2.760.658,00	132.091.346,00
	Jumlah	76.948.798.938,00	45.687.301.978,00	4.568.124.874,00	127.971.563.453,00

D.5. Saldo Dana BOS Reguler dan Kinerja Negeri.

Jumlah penerimaan dana BOS untuk Satuan Pendidikan SMAN, SMKN dan SLBN sebesar Rp. 127.486.903.393,00; dan jumlah pengeluaran dana BOS sebesar Rp. 127.204.225.790,00. Dengan demikian terdapat saldo Kas dana BOS pada Satuan Pendidikan SMAN, SMKN dan SLBN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu tahun 2022 sebesar Rp. 282.677.603,00. Penjabaran saldo dana BOS tahun 2022 diuraikan seperti tabel berikut :

No	Nama Satuan Pendidikan	Jumlah Penerimaan	Jumlah Pengeluaran	Saldo
1	2			4
1.	SMAN	77.181.828.603,00	76.948.798.938,00	233.029.665,00
2.	SMKN	45.732.981.846,00	45.687.301.978,00	45.679.554,00
3.	SLBN	4.572.093.2586,00	4.568.124.874,00	3.968.384,00
	Jumlah	127.486.903.393,00	127.971.563.453,00	282.677.603,00